

Realisasi PAD Rendah Pemprov Kalsel ditegur KPK



Sumber gambar:

<https://apahabar.com/2022/06/realisasi-pad-rendah-pemprov-kalsel-ditegur-kpk/>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan teguran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menyusul rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi tersebut.

"Teguran dari KPK terkait rendahnya realisasi PAD harus ditindaklanjuti," ungkap Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap, Kamis, 16 Juni 2022.

Beberapa strategi dapat dijalankan untuk menggali potensi PAD dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP). Dikatakan Rudy pihaknya telah mengevaluasi PKB tahun 2011-2020 Kalsel dengan nilai potensi penerimaan dari tunggakan Rp962 miliar, namun baru ditindaklanjuti Rp52 milyar.

"Yang pending adalah penanganan redudansi dan inkonsistensi data kendaraan bermotor. Hal ini mengakibatkan tunggakan PKB belum ditangani dan interkoneksi data dengan Presisi Polri tidak berjalan," tambahnya.

BPKP menyarankan beberapa strategi antara lain redudansi ditangani melalui penghapusan data dan rekonsiliasi data dengan aplikasi Presisi Electronic Registration and Identification (ERI) Polri.

Pengembangan aplikasi mobile, termasuk tax clearance system bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. Real-Time Payment System beserta prosedur dan pengembangannya.

Pemprov Kalsel juga harus menyusun Peraturan Gubernur terkait penghapusan tunggakan PKB, melakukan ulasan atas tunggakan PKB, dan menghapus data tunggakan PKB yang tidak valid dari database.

Selain PKB, Pemprov Kalsel juga disarankan menggali potensi PAP, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Tahun 2021, PAP Kalsel sangat kecil dan hanya berkontribusi 0,14 persen ke PAD.

"Kontribusi ini sangat kecil, tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan perkebunan dan pertambangan," ujarnya.

Hasil investigasi sementara BPKP, potensi PAD dari PAP minimal Rp29,7 miliar. Rinciannya, sebesar 95,06 persen berasal dari sektor-sektor yang tidak digali dengan baik, sisanya dari peraturan yang tidak diterapkan dan sanksi tegas.

Tim Teknis Optimalisasi PAP Provinsi Kalsel yang belum efektif, serta interpretasi beragam atas peraturan PAP. Ini membuat pemungutan PAP tidak optimal.

Sumber berita:

1. <https://apahabar.com/2022/06/realisasi-pad-rendah-pemprov-kalsel-ditegur-kpk/>, 19 Juni 2022.
2. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/xkEZBXpK-realisisasi-pad-rendah-kpk-sentil-pemprov-kalsel>, 16 Juni 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan

dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu